

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap entitas bisnis memiliki informasi terkait hasil kinerja pada periode waktu tertentu, Menerbitkan laporan keuangan tahunan menjadi kewajiban perusahaan pada setiap akhir periode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tahun 2022 menyatakan laporan keuangan merupakan upaya penyajian secara terstruktur berdasarkan kondisi dan hasil kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan berfungsi menginformasikan terkait kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas perusahaan.

Peran auditor menjadi hal yang penting untuk mempercayai riset penelitian dalam menilai dan mengevaluasi keandalan bukti informasi keuangan pada entitas atau organisasi tertentu. *Auditing* atau proses audit merupakan tinjauan rangkaian atau susunan kajian sebagai suatu bidang ilmu yang bersifat hierarki berdasarkan filsafat, postulat, konsep, kaidah, dan penerapan teori (Wahyudi et al., 2021). Proses tersebut menjadi pemahaman dalam pembentukan konsep dasar yang akan digunakan oleh auditor sebagai pedoman dalam tugasnya. Keduanya, auditor internal maupun eksternal bisa melakukan jenis tahapan yang sama, dalam audit internal memiliki batasan dengan fokus membantu manajer, dewan

komisaris atau badan pengatur lain yang sejenis untuk mencapai pengelolaan yang optimal dan dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Namun, audit eksternal berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan tahunan.

Penerapan audit bertujuan memberikan hasil laporan berupa opini audit yang diperlukan bagi para *stakeholders* atau dapat sebagai acuan investor dalam mengambil keputusan demi keberlangsungan pendanaan entitas. Selain itu opini audit juga sebagai informasi atau gambaran keandalan laporan keuangan terhadap kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini diperkuat dalam literatur audit, istilah attestasi atau sertifikasi dan akuntabilitas sering digunakan karena hubungan antara ketiga attestasi, akuntabilitas, dan audit *nonassurance* (Atsarina *et al.*, n.d. 2023:20)

Pada jasa attestasi, auditor dipercaya untuk membuat komunikasi secara tertulis atau laporan pernyataan yang menjadi tanggung jawab manajemen perusahaan. Dalam fungsi akuntabilitas, perusahaan melaporkan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga yang telah memberikan tanggung jawab kepada manajemen perusahaan terhadap pengelolaan dana yang ditanamkan pada perusahaan. Semakin tinggi tingkat penilaian terhadap pemangku kepentingan dan opini publik diperlukan pihak ketiga yang independen untuk menilai kredibilitas keuangan yang dilaporkan perusahaan secara transparan (Septiana & Khafid, 2019).

Upaya perusahaan dalam membuktikan keandalan laporan keuangan atas *output* dari manajemen yaitu dengan menggunakan jasa audit eksternal yang berindependen untuk menjaga hubungan baik antara pihak internal dan eksternal perusahaan. Menurut Permatasari *et al.*, (2023) auditor yang memiliki independen dari pihak eksternal menjadi peran penting dalam fungsi pengawas dalam proses pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan. Hal ini berisiko menimbulkan permasalahan keagenan yang biasa terjadi dalam perusahaan.

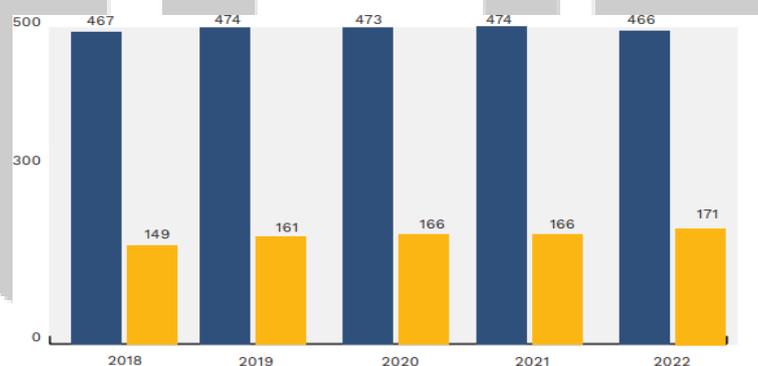
Konflik ini disebabkan terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dengan agen (manajemen). Biasanya agen cenderung bertindak di luar keinginan prinsipal. Manajemen bertanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan yang tinggi, namun mereka juga mengharapkan imbalan atas usaha yang telah dilakukannya untuk perusahaan (Dewi & Surya, 2019). Sebab itu pemilihan auditor menjadi keputusan penting yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan karena perlunya pengawasan agar dapat mengurangi risiko terjadinya kecurangan (*fraud*) di perusahaan dalam pelaporan maupun penyajian laporan keuangan.

Pemilihan auditor eksternal merupakan suatu tahapan evaluasi oleh manajer untuk memastikan auditor memiliki standar kualitas yang tinggi. Perusahaan dalam memilih auditor eksternal dari berbagai kantor akuntan publik (KAP) dengan ditinjau berdasarkan reputasi, independensi, *hardskill*, *softskill* yang memadai (Permatasari *et al.*, 2023). Menurut Akbar & Hifni, (2023) Auditor dapat diukur melalui nilai pendapatan perusahaan serta

membuat proksi antara auditor yang berasal dari *big four* maupun non *big four*. Auditor yang berasal dari *big four* cenderung dinilai memiliki kualitas audit yang lebih tinggi serta melakukan pengawasan yang ketat dibanding dengan auditor yang berasal non *big four*.

Perusahaan dengan memiliki konflik keagenan yang cukup parah disarankan untuk memilih auditor berasal dari *big four*. Perihal ini dapat menjadi suatu kekhawatiran pemilik atas kecurangan manajemen dalam pemilihan auditor yang kemungkinan akan memilih (jenis) auditor yang mereka sukai, terlepas keuntungan bagi perusahaan. Suatu kondisi ketika manajemen beranggapan bahwa audit kurang menguntungkan sehingga cenderung memilih auditor eksternal berdasarkan *fee audit* yang murah (Yu *et al.*, 2020). Pada kondisi ini manajemen tidak mempertimbangkan kualitas dan kuantitas auditor eksternal pada kinerjanya. Pada dasarnya kinerja setiap individu ingin dihargai sesuai dengan tingkat kesulitan suatu pekerjaan untuk hasil optimal.

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah KAP dan Cabang KAP 2018-2022



Sumber: pppk.kemenkeu.go.id

Keterangan:



: Jumlah KAP

: Jumlah Cabang KAP

Menurut data dari kementerian keuangan di periode tahun terbaru yang telah di *publish* tahun 2022 tercatat sebanyak 466 jumlah KAP serta 171 jumlah cabang KAP di Indonesia. *Big four* menjadi sebutan untuk KAP yang memiliki reputasi baik di seluruh dunia. Label besar menjadi salah satu faktor biaya lebih tinggi dibandingkan KAP non *big four* karena dalam pelayanannya memberikan hasil kinerja yang maksimal selama proses pemeriksaan sehingga dapat dipertanggung jawabkan untuk menjaga reputasi (citra) yang telah dimilikinya sebelumnya (Nurhandika & Manalu, 2021).

Di Indonesia, fenomena yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan bahwa Akuntan Publik (AP) melanggar standar audit (SA) dalam kinerjanya mengevaluasi laporan keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia. Akuntan Publik yang bersangkutan yaitu AP Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Fahmi, Sutanto, Bambang dan rekan. Hal ini berawal dari adanya penolakan dua komisaris yaitu Chairal Tanjung dan Dony Oskaria. Menjadi perwakilan dari PT Trans Airways dengan kepemilikan sebesar 28,08 persen karena terdapat perbedaan pencatatan dalam transaksi pendapatan dengan PT Mahata Aero Teknologi senilai US\$239,94 atau setara dengan Rp 3,5 triliun yang sebenarnya belum terjadi hingga akhir tahun 2018, Syahrizal Sidik, Kasus Garuda, BPK: Jangan Sampai Investor Merasa Ditipu!, CNBC, 31 Juli, 2019 hal 1.

Sekretaris Jendral Kemenkeu Hadiyanto merinci kelalaian yang dilakukan oleh AP diantaranya. Kelalaian pertama, AP dianggap melanggar standar audit (SA) 315 karena tidak tepat dalam menilai pengakuan pendapatan pada suatu kegiatan transaksi secara akuntansi, ketika AP telah mengakui pendapatan piutang yang kondisi sebenarnya perusahaan belum menerima nominal tersebut. Kelalaian kedua, AP dianggap melanggar SA 500 karena belum mendapatkan bukti audit dalam menilai laporan keuangan dengan substansi perjanjian transaksi. Kelalaian terakhir, AP dianggap melanggar SA 560 karena tidak mempertimbangkan fakta tanggal laporan keuangan sebagai dasar pengakuan akuntansi.

Berdasarkan pelanggaran yang telah dijelaskan sebelumnya, AP yang bersangkutan dijatuhi dua sanksi oleh Kemenkeu terkait polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia. KAP juga mendapat dijatuhi peringatan tertulis serta wajib melakukan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan pengawasan oleh BDO *International Limited*. Atas permasalahan ini perusahaan perlu memilah auditor eksternal sesuai standar tertentu dan tanpa terkoneksi dengan pihak manapun agar menghasilkan opini audit yang kredibel.

Penelitian ini didasarkan pada *Agency theory* atau teori keagenan. Menurut Septiana & Khafid, (2019) teori keagenan menjadi hal yang mendasari hubungan pemegang saham (*shareholders*) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Perbedaan pendapat antara prinsipal dan agen dapat mengakibatkan konflik internal. Contoh ketika informasi kinerja

perusahaan disampaikan bersifat bias berakibat berbeda pemahaman antar pihak satu sama lain sehingga informasi sesungguhnya tidak tersampaikan dengan baik.

Upaya manajer sebagai agen menginginkan hasil kinerja yang baik dengan menerapkan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan awal tanpa mengambil tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Namun demikian, prinsipal memiliki tujuan mendapatkan keuntungan dengan optimal dalam waktu singkat dari investasi yang telah mereka berikan kepada perusahaan (Akbar & Hifni, 2023). Menurut Corten *et al.*, (2021) Studi empiris menunjukkan bahwa konflik keagenan berhubungan positif dengan pemilihan auditor, umumnya ditetapkan sebagai pilihan auditor *big four* dengan non *big four*. Perusahaan yang lebih besar memiliki risiko reputasi yang tinggi jika terjadi kegagalan dalam proses maupun hasil audit.

Mengawasi laporan keuangan menjadi fokus utama perusahaan agar mudah dalam mendeteksi kecurangan dan pengungkapannya agar terhindari dari kerugian atas tindakan tersebut. Hal ini menjadi upaya yang dilakukan manajemen untuk mendapatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan kepada pihak pemangku kepentingan eksternal maupun internal. Oleh karena itu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan auditor berkualitas adanya tata kelola, koneksi politik, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Pemilihan auditor eksternal salah satunya dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan sistem yang dirancang

untuk memberikan kepemimpinan profesional dalam pengelolaan bisnis berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan, dan keadilan. Menurut Nurhandika & Manalu, (2021) setiap bagian dalam struktur organisasi perusahaan harus memahami ketentuan yang menjadi prinsip dasar mengenai independensi. Bertujuan untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Berdasarkan hal itu, *corporate governance* bertujuan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi *stakeholder* dengan memperhatikan pemangku kepentingan lainnya (Hadi *et al.*, 2016).

Tata kelola perusahaan yang kurang berkualitas akan memilih auditor dengan kualitas rendah agar dapat melakukan tindakan *opaqueness gains* atau bentuk tindakan pengungkapan laporan secara kurang transparan. Menurut Septiana & Khafid, (2019) efektivitas komite audit dan ukuran komisaris independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pemilihan auditor eksternal. Sebaliknya menurut Nurhandika & Manalu, (2021) penelitiannya menyatakan bahwa tata kelola perusahaan positif tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor eksternal.

Pemilihan auditor eksternal ke dua dipengaruhi oleh koneksi politik perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki kemungkinan lebih besar dalam mendapatkan kontrak pengadaan pemerintah, perizinan, regulasi, dan memiliki akses khusus terhadap pembiayaan hutang. Peluang ini dapat mendorong hubungan insentif terhadap perolehan manfaat serta mengurangi tekanan terhadap pengungkapan dengan kualitas yang baik

(Preuss & Königsgruber, 2021). Menurut Guedhami *et al.*, (2014) menyatakan secara khusus bahwa koneksi politik memberikan insentif kepada perusahaan terkait dan tidak terindikasi transaksi mandiri akan lebih memilih mempublikasi laporan keuangan yang berkualitas untuk menjamin kepercayaan pihak investor, dengan ini keputusan perusahaan akan menunjuk auditor yang berkompeten dan memiliki reputasi yang baik dapat meningkatkan peluang mereka. Namun, menurut Wahyudi *et al.*, (2021) berdasarkan hasil penelitiannya koneksi politik melalui pemerintah kepemilikan saham pada perusahaan tidak berpengaruh terhadap pemilihan auditor.

Berdasarkan latar belakang serta hasil penelitian ini, maka diputuskan untuk melakukan penelitian terhadap variabel tata kelola dan koneksi politik berpengaruh terhadap pemilihan auditor. KAP non *big four* dianggap kurang ketat dalam pemantauan selama proses audit dibandingkan dengan KAP *big four*. Hal ini menjadi salah satu alasan sikap manajemen yang beranggapan bahwa proses audit kurang maksimal jika dilakukan oleh para auditor dari KAP non *big four* (Corten *et al.*, 2021).

Peneliti menetapkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol bertujuan untuk memperkuat hubungan antar variabel tata kelola dan koneksi politik dengan pemilihan auditor eksternal, dan tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Bertujuan mendapatkan hasil kesimpulan yang kuat tentang hubungan antar variabel *corporate governance* dan koneksi politik.

Motivasi yang melatar belakangi penelitian ini, yaitu ingin mengembangkan penelitian dari dua judul penelitian. Yang pertama Nurhandika & Manalu, (2021) meneliti pengaruh *CEO power* dan *Political Connection* terhadap pemilihan auditor. Hasil yang didapat dari penelitian ini hanya berfokus pada kriteria yang dipilihnya melalui *purposive sampling* yaitu pada perusahaan yang berindek LQ45 di Bursa Efek Indonesia dan hanya meneliti satu periode saja di tahun 2018. Penelitian ini juga hanya meneliti dua variabel independen diantaranya terdapat variabel *CEO power* dan koneksi politik.

Pada penelitian berikutnya diharapkan memiliki perkembangan terhadap jumlah sampel serta menambah variabel kontrol dan menggunakan proksi lain terhadap koneksi politik. Penelitian sebelumnya menggunakan koneksi politik sebagai variabel independen. Sehingga penelitian ini menambah variabel independen lainnya yaitu tata kelola perusahaan. Penelitian terdahulu dalam sampelnya menggunakan 45 laporan tahunan berindeks LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, sementara itu penelitian sekarang ini menggunakan sampel pada perusahaan sektor transportasi dan logistik di Indonesia.

Penelitian kedua oleh Nurhandika & Manalu, (2021) berjudul pengaruh tata kelola perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap pemilihan auditor eksternal. Hasil yang diperoleh dari populasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 dengan menggunakan regresi logistik, sementara

itu penelitian sekarang ini menggunakan sampel pada perusahaan sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Perusahaan sektor transportasi dan logistik digunakan sebagai sampel karena berperan penting dalam pertumbuhan perekonomian di masa depan. Faktor lain berdasarkan fenomena penelitian terdapat indikasi kelalaian auditor yang mempengaruhi reputasi auditor serta KAP yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian sekarang ingin menyempurnakan penelitian terdahulu. Peneliti menambah dan mengubah komponen mengenai faktor terjadinya pemilihan auditor dengan mengangkat judul analisis pemilihan auditor eksternal pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di bursa efek indonesia periode tahun 2020-2023.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat menentukan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap pemilihan auditor?
2. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap pemilihan auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka tujuan pencapaian dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji pengaruh tata kelola terhadap pemilihan auditor pada sektor transportasi dan logistik.
2. Menguji pengaruh koneksi politik terhadap pemilihan auditor pada sektor transportasi dan logistik.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan wawasan mengenai pengaruh pentingnya tata kelola dan koneksi politik terhadap pemilihan auditor eksternal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Serta menjadi sumber kajian bagi peneliti lainnya dan referensi dalam ilmu keuangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya tentang pentingnya tata kelola dan koneksi politik terhadap pemilihan auditor eksternal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada sektor transportasi dan logistik yang listing di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Sistematika Penelitian Proposal

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAU PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka menguraikan terkait teori, hasil penelitian terdahulu, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat penjelasan terkait rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi masing-masing variabel, definisi operasi dan pengukuran variabel, populasi sampel, teknik pengambilan data, dan metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini memuat cara dalam mengolah data, membuat tabulasi dan menguji data yang kemudian dianalisis setelah data dinyatakan valid.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup menjelaskan kesimpulan dari hasil menguji data dan saran penelitian untuk penelitian berikutnya agar dapat lebih menyempurnakan dari penelitian sebelumnya.